

Research Article

Implementation of Educational Democracy in Learning to Form Student Character in High Schools

Sekar Kurnia Rahmadani

Universitas Negeri Padang

E-mail: sekarkurnia07@gmail.com

Firman

Universitas Negeri Padang

E-mail: firman@fip.unp.ac.id

Dina Sukma

Universitas Negeri Padang

E-mail: sukmadina@fip.unp.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aslim: Journal of Education and Islamic Studies.

Received : Januari 8, 2025

Revised : February 5, 2025

Accepted : February 19, 2025

Available online : March 2, 2025

How to Cite: Sekar Kurnia Rahmadani, Firman, & Dina Sukma. (2025). Implementation of Educational Democracy in Learning to Form Student Character in High Schools. Aslim: Journal of Education and Islamic Studies, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.63738/aslim.v2i1.28>

Abstract

Education is one of the basic human needs that must be met so that humans can be more respected and considered superior compared to people who do not receive education. This is because education has a more important purpose than simply ensuring human survival. Furthermore, education is a component that cannot be separated from a person in any way. Humans undergo a complete education process, which is influenced by their parents, culture, and environment, starting from when they are in the womb to adulthood and old age. To assess how educational democracy can be integrated into the learning process of students enrolled in secondary schools, the purpose of this study is to investigate the possibility of doing so. An approach known as a literature study was used in this study. This approach involves collecting data from websites, publications, and journals that can be accessed via the internet. The information is then subjected to qualitative analysis, which involves the use of various methodologies for data analysis during a process consisting of four stages: obtaining data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. As a result of these findings, students are currently not only used as objects of learning, but also used as subjects who are directly involved in the arguments that occur during the learning process. Thus, it is hoped that teachers can provide a democratic learning environment for their students.

Keywords: Educational Democracy, 21st Century Education, High School.

Penerapan Demokrasi Pendidikan Pada Pembelajaran Untuk Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah Menengah Atas

Implementation of Educational Democracy in Learning to Form Student Character in High Schools

Sekar Kurnia Rahmadani, Firman, Dina Sukma

Abstrak:

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar manusia dapat lebih dihormati dan dianggap lebih unggul dibandingkan dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki tujuan yang lebih penting daripada sekadar menjamin kelangsungan hidup manusia. Lebih jauh lagi, pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dilepaskan dari diri seseorang dengan cara apa pun. Manusia menjalani proses pendidikan secara utuh, yang dipengaruhi oleh orang tua, budaya, dan lingkungannya, dimulai sejak dalam kandungan hingga dewasa dan lanjut usia. Untuk menilai bagaimana demokrasi pendidikan dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran siswa yang terdaftar di sekolah menengah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan untuk melakukannya. Pendekatan yang dikenal sebagai studi literatur digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari situs web, publikasi, dan jurnal yang dapat diakses melalui internet. Informasi tersebut kemudian menjadi sasaran analisis kualitatif, yang melibatkan penggunaan berbagai metodologi untuk analisis data selama proses yang terdiri dari empat tahap: memperoleh data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Sebagai hasil dari temuan tersebut, siswa saat ini tidak hanya digunakan sebagai objek pembelajaran, tetapi juga digunakan sebagai subjek yang terlibat langsung dalam argumen yang terjadi selama proses pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan guru dapat menyediakan lingkungan belajar yang demokratis bagi siswanya.

Kata Kunci: Demokrasi Pendidikan, Pendidikan abad 21, Sekolah Menengah Atas.

PENDAHULUAN

Pancasila akan menjadi landasan bagi kerangka demokrasi yang akan mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia, seandainya dunia ini sempurna. Demokrasi pendidikan merupakan suatu cara hidup yang mengutamakan dan menekankan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama dalam proses pendidikan berkelanjutan antara pendidik dan peserta didik. Filosofi ini juga dikenal sebagai sistem pendidikan yang demokratis. Lebih jauh lagi, demokrasi pendidikan merupakan suatu cara hidup dalam praktiknya. Pengelolaan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor suku, bangsa, agama, maupun ras. Sistem pendidikan yang demokratis merupakan suatu cara hidup. Konsep demokrasi pendidikan sangat mengutamakan keadilan dan pemerataan karena mengakui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Khususnya dalam kasus Indonesia yang merupakan negara demokrasi, deklarasi ini berlaku. Sistem pendidikan yang menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan unik setiap anak disebut "pendidikan demokratis". Akibatnya, pendidikan menjadi sangat penting bagi seluruh bangsa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pancasila akan menjadi landasan kerangka demokrasi yang akan mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia, jika dunia sudah sempurna.

Demokrasi pendidikan merupakan cara hidup yang mengutamakan dan menekankan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama dalam proses pendidikan berkelanjutan antara pendidik dan peserta didik. Filosofi ini juga dikenal sebagai pendekatan demokrasi dalam pendidikan. Lebih jauh, demokrasi pendidikan merupakan cara hidup yang harus dianut. Pengelolaan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin relevan, seperti ras, agama, suku bangsa, atau bangsa. Merupakan cara hidup untuk memiliki kerangka kerja

demokrasi dalam pendidikan. Karena mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, gagasan demokrasi pendidikan menempatkan prioritas tinggi pada pemeliharaan keadilan dan kesetaraan. Perlu dicatat secara khusus bahwa proklamasi ini berlaku dalam situasi Indonesia, yang merupakan negara demokrasi. Sistem pendidikan yang mempertimbangkan kemampuan khusus setiap anak dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah disebut sebagai "pendidikan demokratis." Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat penting bagi seluruh bangsa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sarana keuangan untuk menempuh pendidikan tinggi.

Agar manusia lebih dihormati dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak berpendidikan, salah satu keinginan mendasar manusia yang harus dipenuhi adalah keinginan untuk mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Lebih jauh lagi, pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dilepaskan dari diri seseorang. Manusia menjalani proses pendidikan secara utuh, yang dipengaruhi oleh orang tua, budaya, dan lingkungannya, mulai dari saat manusia masih dalam kandungan hingga dewasa dan lanjut usia. Selain itu, pemerintah bertugas untuk mengelola pendidikan wajib, yang dapat diartikan bahwa anak-anak di Indonesia diwajibkan untuk bersekolah selama dua belas tahun. Menurut Aristoteles, pendidikan warga negara merupakan tanggung jawab mendasar negara, yang utamanya diselenggarakan untuk kepentingan negara itu sendiri. Negara merupakan lembaga sosial yang paling utama karena memfasilitasi pencapaian tujuan akhir: kesejahteraan kolektif warga negaranya. Di Indonesia, pengaturan sistem pendidikan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang dicontohkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mengatur sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif semua aspek penyelenggaraan sistem pendidikan nasional Indonesia.

Sejak dimulainya era reformasi, kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sudah sangat terbuka dan transparan. Hal ini berbeda dengan era Orde Baru, di mana masyarakat tampak lebih terkekang atau kurang bersemangat untuk maju. Keadaan tersebut berubah-ubah selama masa Orde Baru yang masih berkuasa. Saat itu, masyarakat menuntut banyak hal, salah satunya adalah demokrasi. Demokrasi berangsur-angsur kembali hadir di Indonesia sejak era reformasi. Banyak aspek kehidupan yang mengalami perubahan besar akibat perubahan tersebut, terutama dalam bidang pendidikan, terutama terkait pembentukan lembaga pendidikan yang demokratis.

Demokrasi pendidikan merupakan suatu perspektif yang menempatkan hak dan kewajiban yang sama, serta perlakuan yang sama dan adil dari pendidik kepada semua peserta didik, tanpa diskriminasi dalam setiap dan semua bidang kegiatan pembelajaran, termasuk yang berlangsung di dalam dan di luar kelas. Hal ini disebut sebagai konsep demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan menjamin bahwa setiap individu diberikan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, tanpa diskriminasi atas dasar kriteria seperti agama, suku, ras, atau status sosial.

Akibatnya, hal ini menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengartikulasikan keyakinan mereka dan tumbuh hingga mencapai potensi penuh mereka melalui media pendidikan. Demokrasi dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Anak-anak menjadi pusat perhatian dalam pendidikan demokratis, yang pada akhirnya menghasilkan perkembangan individu yang lebih berbelas kasih dalam benak siswa. Namun faktanya adalah masih terdapat kesenjangan atau ketidaksetaraan yang signifikan dalam pendidikan. Individu yang lebih cerdas daripada yang lain diperlakukan berbeda di kelas. Mereka yang memiliki kecerdasan lebih rendah juga diperlakukan berbeda.

Siswa bukan hanya objek pembelajaran dari guru, yang hanya menerima pengetahuan secara pasif tanpa adanya pertukaran ide atau percakapan dalam proses pembelajaran, tetapi demokrasi pendidikan juga menghendaki siswa untuk aktif dan mampu mengekspresikan pikiran mereka secara terbuka saat mereka belajar. Lebih jauh, demokrasi pendidikan berupaya untuk memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk menyuarakan pikiran mereka secara terbuka saat mereka belajar.

Dalam bidang pendidikan, sistem demokrasi dicirikan oleh komitmennya terhadap perlakuan yang adil dan hak serta tanggung jawab yang sama bagi semua siswa. Gagasan demokrasi pendidikan tidak hanya mencakup kerangka prosedur, tetapi juga prinsip-prinsip dasar yang menjunjung tinggi dan menghargai martabat dan rasa hormat manusia. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa demokrasi pendidikan akan mendorong pertumbuhan individu yang kreatif, kritis, dan produktif, sekaligus memastikan bahwa mereka tidak harus melepaskan martabat atau harga diri mereka (Moh Shofan, 2007:123)

Peneliti tertarik untuk menyelidiki penggunaan demokrasi pendidikan dalam proses pembelajaran siswa yang terdaftar di sekolah menengah kejuruan karena alasan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi beberapa metode berbeda di mana demokrasi pendidikan dapat digunakan dalam proses pembelajaran siswa yang terdaftar di sekolah menengah kejuruan. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan bermanfaat karena akan memberikan kontribusi pada pengetahuan terkini mengenai penggabungan demokrasi pendidikan ke dalam pengalaman pendidikan siswa di sekolah-sekolah.

METODE PENELITIAN

Studi pustaka merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber, baik dari hasil penelitian ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal, maupun dari situs web dan artikel yang dipublikasikan di internet. Setelah itu, data yang telah terkumpul diorganisasikan dan dikategorikan sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Metode analisis data memiliki empat tahap. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: pengumpulan data melalui telaah pustaka, reduksi data, yang meliputi penyederhanaan data yang diperoleh yang relevan dengan judul penelitian, penyajian data, di mana data yang disederhanakan disampaikan sebagai informasi dan bukan data mentah, dan terakhir, perumusan kesimpulan berdasarkan data yang disajikan di bagian kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dan Demokrasi

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan. Penerapan suatu teori, metode, atau unsur-unsur lain untuk mencapai tujuan tertentu dan sesuai dengan kepentingan suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan diorganisasikan terlebih dahulu merupakan definisi lain dari implementasi yang diberikan oleh beberapa pakar. Menurut Usman (2002), Implementasi itu sendiri dapat didasarkan pada aktivitas, tindakan, atau aksi, atau bahkan dapat berupa keberadaan proses sistem. Istilah "implementasi" tidak hanya merujuk pada tindakan, tetapi juga merujuk pada aktivitas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan aktivitas tersebut. Menurut Setiawan (2004) Implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling memengaruhi proses interaksi antara tujuan dan tindakan sebagai sarana untuk mencapainya. Agar implementasi dapat berhasil, diperlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien dan efektif. Jika definisi ini diperhatikan, maka dapat disimpulkan bahwa istilah "implementasi" dapat dipahami sebagai suatu kegiatan, keberadaan kegiatan, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Berdasarkan ungkapan mekanisme tersebut, implementasi bukan sekadar suatu kegiatan, melainkan suatu tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat sesuai dengan kriteria normatif tertentu untuk mencapai tujuan yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses melakukan sesuatu dalam bentuk kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, implementasi juga termasuk dalam proses penerapan demokrasi pendidikan di ruang kelas sekolah.

Untuk menjamin agar setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dan setara dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, demokrasi pendidikan merupakan komponen penting dalam pembelajaran pendidikan yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan pandangan sejumlah ahli, penting untuk memahami pengertian demokrasi. Secara umum, demokrasi dipahami sebagai suatu cara hidup yang meliputi sikap toleransi, kesediaan untuk mendengar, dan penerimaan terhadap pandangan orang lain (Print, Orstrom dan Nielson: 2002). Sedangkan menurut Abdi, Ellis dan Shiza (2005) Menerima kerja sama secara adil merupakan komponen penting demokrasi. Levinger (2000) demokrasi dapat diartikan sebagai suatu paham atau konsep yang menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki kedudukan istimewa dalam sistem hukum. Salah satu pengertian demokrasi dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikannya sebagai suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh warga negara dalam proses pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Pengertian ini sesuai dengan pengertian demokrasi. Selain itu, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu falsafah atau pandangan hidup yang memberikan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh KBBI. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah praktik memperlakukan orang lain secara adil dan setara, tanpa membedakan golongan, warna kulit, golongan, agama, atau pertimbangan lainnya. Demokrasi tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional dan negara, tetapi juga

dalam sistem pendidikan. Untuk menjamin agar semua peserta didik memperoleh kesempatan yang adil dan setara, maka pelaksanaan demokrasi merupakan suatu keharusan.

Selanjutnya, pendidikan memiliki arti yaitu menurut Siagian (2006) mengatakan bahwa pendidikan meliputi keseluruhan proses, taktik, dan metode pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan mewariskan ilmu pengetahuan dari satu individu ke individu lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan Notoadmodjo (2003) pendidikan adalah segala sesuatu yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, maupun masyarakat, agar melaksanakan apa yang diharapkan oleh pendidik, sesuai dengan pernyataan bahwa pendidikan adalah segala sesuatu. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberikan pendidikan kepada seorang anak merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupannya. Pendidikan dalam pengertian yang paling mendasar adalah sesuatu yang berhubungan dengan semua kekuatan yang ada di alam ini agar semua peserta didik, sebagai anggota masyarakat dan sesama manusia, mampu memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemindahan ilmu pengetahuan, penambahan pengetahuan, atau penambahan keterampilan, yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya, baik secara formal maupun informal, oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan atau mencari pengalaman, atau untuk meningkatkan kualitas diri dan menjadi lebih baik melalui pendidikan. Kesimpulan tersebut dapat ditarik dari beberapa pernyataan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi merupakan tiga jenjang pendidikan yang dianggap paling mendasar. Pendidikan berjalan melalui berbagai macam jenjang.

Selanjutnya, ada berbagai macam pendidikan, antara lain pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. SD dan MI, serta yang sederajat, termasuk dalam pendidikan dasar. Pada jenjang pendidikan menengah, SMP/MTs, SMK/MA, dan program lain yang sederajat termasuk dalam sistem pendidikan. Selain itu, program yang mengarah ke diploma, program yang mengarah ke gelar sarjana, program yang mengarah ke gelar magister, program yang mengarah ke gelar doktor, program profesi, dan program spesialisasi semuanya termasuk dalam ranah pendidikan tinggi. Pendidikan formal, yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi, diatur oleh sejumlah aturan yang berbeda. Program pendidikan yang terstruktur dan berbasis jenjang itulah yang kita sebut sebagai pendidikan formal. Istilah "pendidikan nonformal" mengacu pada lembaga pendidikan yang berada di luar ranah pendidikan formal. Lembaga-lembaga ini biasanya bersifat hierarkis dan teratur, seperti lembaga yang menawarkan kursus dan pelatihan. Ketika seorang anak diajarkan oleh ibunya bagaimana berperilaku hormat dengan orang lain, misalnya, ini merupakan contoh pendidikan informal, yaitu lembaga pendidikan yang berfokus pada anggota keluarga dan lingkungan. Tujuan pendidikan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan mutu manusia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Akibatnya, hal ini menyiratkan bahwa untuk menanamkan pendidikan demokrasi pada siswa, mereka harus mampu memahami dan mampu

menyumbangkan apa yang mereka peroleh dari dunia luar. Hal ini tidak terbatas pada apa yang diajarkan dalam kurikulum dan materi pengajaran standar. Di sisi lain, pelatihan guru harus difokuskan pada pengembangan kemampuan untuk berempati dengan tantangan yang ada di lingkungan mereka. Ada banyak interpretasi tentang demokrasi yang dapat ditemukan dari berbagai sudut pandang karena demokrasi bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari, dipahami, dan diterapkan secara instan.

Demokrasi Pendidikan

Begitu kita memiliki pemahaman yang kuat tentang hubungan yang terjalin antara demokrasi dan pendidikan, kita akan mampu memahami makna demokrasi pendidikan, yang merupakan salah satu komponen yang membentuk pendidikan, khususnya demokrasi pendidikan. Sesuai dengan definisi demokrasi pendidikan, sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan pedagogi harapan dianggap sebagai demokrasi pendidikan. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk menumbuhkan lingkungan yang kritis dan aman, untuk menghidupkan kembali wacana, dan untuk mendorong partisipasi dari semua pihak yang relevan. Ada satu kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan ini, yaitu bahwa demokrasi pendidikan terjadi ketika ide-ide demokrasi dimasukkan ke dalam proses pendidikan. Dalam pengertian yang lebih spesifik, demokrasi pendidikan mengacu pada sistem pendidikan di mana terdapat proses pembelajaran yang tidak membedakan siswa berdasarkan status sosial, suku, agama, ras, atau faktor-faktor lain yang membedakan siswa dari elemen-elemen lainnya. Penerapan pembelajaran sekolah yang demokratis merupakan salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi pendidikan. Melibatkan semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk siswa, instruktur, dan orang lain yang memiliki minat dalam pendidikan, adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini (Zahrawati B, 2018).

Adanya kelas yang demokratis merupakan salah satu ciri khas pembelajaran yang demokratis. Di kelas seperti itu, setiap siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan pertumbuhan pribadi mereka sendiri dalam lingkungan yang aman dan nyaman, dan mereka juga dibuat merasa diterima oleh teman-teman sekelasnya. Penerapan kurikulum yang demokratis diperlukan untuk mewujudkan tujuan kelas yang demokratis. Kurikulum ini tidak hanya harus memuat pertukaran pendapat antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga harus memberikan kesempatan terbuka bagi setiap mahasiswa untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan mahasiswa lain di kelas. Dalam kerangka demokrasi pendidikan, diharapkan bahwa siswa akan diperlakukan secara adil dalam konteks pembelajaran dan akan dapat dengan bebas menyuarakan pendapat mereka tanpa merasa tidak dihargai. Kemampuan untuk memperlakukan murid secara adil sekaligus mengakui keunikan masing-masing siswa merupakan salah satu prinsip dasar pendidikan demokratis, yang merupakan konsep yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Konsep demokrasi dalam pendidikan menekankan pada gagasan bahwa setiap siswa berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak mengalami diskriminasi apa pun. Kegiatan belajar dalam demokrasi pendidikan tidak hanya menekankan pada pengajar sebagai satu-satunya sumber

informasi, tetapi juga menuntut guru untuk bertukar informasi secara terbuka dengan siswa dan menyediakan diri bagi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan, menerima tanggapan, mengemukakan gagasan, dan mengeluhkan sesuatu.

Dalam konteks pendidikan, demokrasi pendidikan mengacu pada bentuk pendidikan yang memberikan hak kepada setiap individu atau peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang sama dan adil, serta pengajaran yang bebas dari prasangka buruk. Implikasinya, anak dari keluarga kaya dan anak dari keluarga miskin berhak memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Karena pendidikan diberikan di dalam kelas, maka setiap peserta didik yang melanjutkan pendidikan diberikan ijazah yang sama. Secara khusus, hal ini disebabkan karena tujuan pendidikan adalah untuk memperoleh informasi dan pendidikan. Guru berkewajiban untuk mendidik anak yang mampu maupun yang kurang mampu secara bersamaan. Konsep pemberian kesempatan yang sama menjadi landasan komitmen pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran. Terkait demokrasi kelembagaan dalam pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Beberapa contoh prinsip tersebut adalah kewajiban menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia, kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan nilai-nilai luhur yang dimilikinya, dan kewajiban berupaya memenuhi hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di tingkat nasional dengan memanfaatkan kemampuannya tanpa merugikan orang lain. Dalam rangka pembelajaran yang berlangsung di sekolah antara pengajar dan peserta didik, demokrasi pendidikan dapat diimplementasikan dengan berbagai cara.

Pembelajaran menurut Sadiman, dkk., (1986) dimulai saat mereka masih bayi dan berlanjut hingga saat mereka meninggal, setiap orang mengalami berbagai proses dan pengalaman belajar sepanjang hidup mereka. Selain berlangsung di lokasi mana pun, terlepas dari apa, bagaimana, atau siapa yang terlibat, pembelajaran dapat berlangsung di mana saja. Ini termasuk situasi seperti di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di masyarakat. Ada sejumlah penanda bahwa seseorang telah mempelajari sesuatu, termasuk perubahan dalam proses kognitif mereka, perubahan dalam keterampilan mereka (psikomotorik), dan perubahan dalam sikap atau perilaku mereka (afektif). Pribadi (2009) menurut pernyataan tersebut, pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan belajar pada diri manusia. Sementara itu, Gegne menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang disusun secara sengaja dengan tujuan untuk membantu terlaksananya proses pembelajaran. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam Pribadi (2009). Lebih lanjut menurut Depdiknas (dalam Warsita, 2008) Menurut Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan kontak antara peserta didik dengan pendidik, serta interaksi dengan sumber belajar yang berlangsung dalam konteks tempat berlangsungnya pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang berlangsung selama proses pembelajaran dan melibatkan

interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi yang berlangsung selama proses pembelajaran perlu menjunjung tinggi asas demokrasi agar semua peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dan tidak terjadi ketimpangan.

Siswa dikatakan terlibat dalam pembelajaran demokratis apabila mereka tidak hanya diperlakukan sebagai objek pembelajaran tetapi juga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, membantah keyakinan orang lain, atau keduanya. Siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran demokratis, yang menjadi alasannya. Pendekatan pendidikan yang demokratis memastikan bahwa setiap siswa diberi kesempatan yang sama dan pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Meskipun demokrasi pendidikan merupakan suatu kerangka kerja, model pembelajaran harus menghindari terciptanya suasana yang terlalu menegangkan dan penuh dengan perintah dan instruksi. Hal ini disebabkan karena hal tersebut menyebabkan siswa kehilangan minat belajar, serta menyebabkan mereka menjadi tidak aktif dan tidak tertarik pada interaksi yang terjadi antara dosen dan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mempelajari kemampuannya sendiri dalam kerangka demokrasi pendidikan. Sebagai bagian dari kerangka proses pembelajaran demokratis, pendidik atau guru dipercayakan dengan kewajiban bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik bertanggung jawab untuk memberi siswa kesempatan untuk memperoleh makna dari konten yang diberikan kepada mereka atas kemauan mereka sendiri. Para pendidik tidak hanya berperan sebagai agen yang dinamis, tetapi mereka juga diberi tanggung jawab untuk berupaya menciptakan lingkungan belajar yang berorientasi pada proses dan menggabungkan dialog. Pemberian instruksi atau arahan merupakan cara lain di mana para pendidik membantu siswa, selain peran mereka sebagai mediator. Selain itu, mereka berperan sebagai motivator, memberikan dorongan kepada siswa untuk memastikan bahwa mereka tetap bersemangat dalam proses memperoleh pengetahuan.

Penyediaan kemungkinan bagi guru dan siswa untuk berbicara bebas satu sama lain saat mereka terlibat dalam proses pembelajaran di kelas merupakan salah satu cara, menurut Paolo Feire, agar demokrasi pendidikan dapat terwujud. Hasilnya, adalah mungkin untuk membangun suasana egaliter, yang dapat diartikan sebagai tingkat kesetaraan dan kebersamaan yang terjalin antara guru dan siswa atau pembelajar. Murid sendiri memiliki beberapa arti diantaranya yaitu menurut Hamalik (2001) salah satu komponen dalam pengajaran adalah siswa, atau siswa itu sendiri, atau siswa itu sendiri, di samping tujuan, pendekatan pengajaran, dan ciri-ciri guru. Secara umum disepakati bahwa di antara semua komponen yang ada saat ini, siswa yang diyakini sebagai salah satu komponen adalah komponen yang paling penting. Menurut Djamarah (2011) siswa atau peserta didik merupakan subjek utama dalam pendidikan setiap saat. Sedangkan menurut Daradjat (dalam Djamarah, 2011) anak-anak, yang sering disebut sebagai murid, merupakan individu yang tak tertandingi yang memiliki potensi dan menjalani proses perkembangan. Dalam proses perkembangannya, anak-anak atau siswa membutuhkan bantuan dari individu yang sifat dan karakternya tidak dibentuk oleh pengajar melainkan oleh anak itu sendiri, sepanjang perjalanan hidup yang dilalui bersama orang lain. Dapat disimpulkan bahwa, selain guru, siswa atau murid merupakan subjek atau pelaku utama dalam proses

pembelajaran. Kesimpulan ini dapat diambil dengan mempertimbangkan sudut pandang para ahli.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada warga negara sejak usia dini. Generasi muda didorong untuk mengembangkan pola pikir demokratis melalui penerapan strategi ini. Selain terbatas pada ranah kognitif, desain pendidikan demokrasi juga harus mampu mencapai taraf penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan guna menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Lambatnya pertumbuhan demokrasi di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor di dalam negeri. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah pendidikan nilai-nilai demokrasi di sekolah yang selama ini terlalu menekankan komponen kognitif cita-cita demokrasi. Akibatnya, siswa merasa cukup dengan memahami apa itu demokrasi dan tidak perlu mempraktikkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegagalan pendidik dalam menanamkan ide-ide demokrasi kepada siswa, di mana guru hanya berfokus pada komponen kognitif siswa, hanya akan menghasilkan siswa yang tidak memahami prinsip-prinsip demokrasi dan warga negara, yang merupakan tujuan sistem pendidikan di Indonesia (UU NO.20 Th 2003).

Sejumlah topik yang berkaitan dengan demokrasi dibahas, termasuk konsep demokrasi Pancasila, penerapan demokrasi di Indonesia, dan tema-tema lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan siswa ketika membahas nalar adalah hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi. Jika siswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang demokrasi, maka materi yang telah dipelajarinya akan tertanam dalam benaknya. Jika dalam kehidupan sehari-hari mereka menjumpai praktik-praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka mereka telah memiliki prasangka tentang bagaimana mereka seharusnya menyikapi praktik-praktik tersebut, yaitu apakah mereka harus menerimanya atau menolaknya. Ketika siswa mempelajari penerapan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, misalnya, mereka dapat mengenali tindakan pemerintah yang sejalan dengan cita-cita demokrasi dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Siswa juga dapat mengenali kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, sisi afektif dapat dikenali melalui banyak sikap, seperti kerja sama, menghargai keberagaman, sportivitas, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Siswa, misalnya, memiliki kemampuan untuk berperilaku dengan cara yang mendukung pemeliharaan prinsip-prinsip demokrasi. Ini termasuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti musyawarah untuk mencapai konsensus, memilih ketua kelas atau ketua OSIS, memberikan suara dalam pemilihan umum, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, dan berpartisipasi dalam memegang jabatan publik, antara lain. Sebagai ilustrasi, ini adalah salah satu cara di mana kapasitas siswa untuk memahami demokrasi dapat dievaluasi dan dievaluasi berdasarkan bagaimana mereka mewujudkan apa yang mereka pahami menjadi kenyataan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilihan OSIS di Sekolah Menengah Atas merupakan salah satu bentuk instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana siswa memahami demokrasi dari sudut pandang karakteristik

proseduralnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana siswa mempersepsikan demokrasi. Di sisi lain, ditemukan bahwa instrumen ini tidak memberikan kontribusi terhadap pemahaman siswa tentang demokrasi dalam bentuknya yang paling murni; sebaliknya, instrumen ini hanya mengarah pada keterlibatan yang menunjukkan kewajiban siswa daripada hak-haknya sebagai warga negara. Menurut Gabriel Almond, komponen terpenting dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi adalah proses sosialisasi politik, yang mencakup tiga komponen pendidikan: kognitif, emosional, dan evaluatif. Ini adalah hal terpenting yang dapat dilakukan. Karena penelitian kami tidak mendukung tesis Schumpeter, mustahil untuk menentukan apakah apa yang dikatakannya mengenai demokrasi prosedural itu benar atau tidak. Agar mampu mengembangkan pemikiran mereka sendiri, siswa perlu mampu memasukkan lingkungan dalam menafsirkan pemahaman mereka tentang demokrasi, sebagaimana dikemukakan Paulo Friere. Hal ini diperlukan agar siswa mampu membangun pemikiran mereka sendiri. Selain itu, perlu untuk memberi mereka kesempatan untuk menemukan pemahaman alternatif selain pemahaman yang diperoleh dari kurikulum yang ditawarkan selama proses persekolahan formal.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan pendidikan, istilah "pendidikan demokratis" mengacu pada kerangka kerja yang memasukkan ide dan nilai demokratis ke dalam proses pendidikan. Terdapat kontak antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk kegiatan untuk membantah, menjawab, mengajukan pertanyaan, dan sebagainya. Peserta didik bukan sekadar objek dalam proses pendidikan; melainkan, terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik. Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam proses pendidikan, pembelajaran dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melibatkan ketidakadilan antara individu di antara mereka sendiri. Akibatnya, pendidikan demokratis tidak hanya diterima melalui sekolah, tetapi juga dapat diperoleh dari berbagai media lain yang tersedia, khususnya media elektronik, yang memainkan peran penting dalam pemahaman peserta didik tentang apa artinya menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemahaman siswa tentang demokrasi secara umum dapat dikatakan telah memadai jika pemilihan OSIS dilaksanakan di SMA dan melibatkan seluruh aspek siswa. Siswa yang menduduki jabatan sebagai pemilih, siswa yang menduduki jabatan untuk dipilih, dan siswa yang menjadi peserta didik dalam panitia pemilihan umum, semuanya termasuk dalam kategori ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki siswa. Di sisi lain, pendapat anak-anak tentang demokrasi dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang berbeda, seperti sekolah mereka, keluarga mereka, lingkungan mereka, dan bentuk-bentuk media massa lainnya, khususnya televisi massa. Pemahaman mereka tentang demokrasi berasal dari sumber-sumber yang cukup terpisah dari sumber-sumber tersebut. Pelaksanaan Pemilihan OSIS berfungsi sebagai alat untuk menguji pemahaman siswa tentang demokrasi dari perspektif prosedural; meskipun demikian, instrumen ini dianggap tidak memberikan wawasan yang berarti karena tidak mengevaluasi kemahiran siswa dalam prosedur demokrasi. Sebaliknya, instrumen ini hanya

mencerminkan kewajiban dan tugas mereka; itu tidak mencerminkan hak-hak mereka sebagai warga negara karena alasan apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Muhammad, Alu Abd. Latif, (Departemen Agama Saudi Arabia 1422 H)
- Abu Ahmad, Nurbaeti, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Bineka Cipta, 1991) Bachtiar, Metodologi Penelitian (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Chairul Mahfud, Pendidikan Multikultural, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Dahlan Al-Bahri, Kamus Modern Bahasa Indonesi, (Yogyakarta: Arkola), 1994
- Dahl, Robert, Perihal Demokrasi, Demos, Yogyakarta, 1998
- Firdaus, S. (2016) . Demokrasi pendidikan ala soekarno dan implikasinya bagi pendidikan islam.1(1) :2-3
- Irawan, I., & Hermawan, D. (2019). Konseptual model pendidikan demokratis perspektif pendidikan islam. Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 626-631
- Setiyadi, A. C. (2010). Konsep demokrasi pendidikan menurut john dewey. At-Ta'dib, 5(1).
- Sinambela, P. N. (2017). Kurikulum 2013 dan implementasinya dalam pembelajaran. Generasi Kampus, 6(2).
- Zahrawati, F., & Faraz, N. J. (2017). Pengaruh kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif siswa. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS, 4(2), 131-141.
- Zahrawati B, F. (2018). Membebaskan Anak Tunadaksa dalam Mewujudkan Masyarakat Multikultural Demokratis. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 11(1), 171-188
- Zahrawati, F., Maryadi, M., Idris, M., Gusti, D. H., Asri, A., & Aras, A. (2021). The Effect of Organizational Culture on Self-Concept and Discipline toward Self-Regulated Learning. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 24(2), 290-302